

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini membahas kajian teoretis yang menjadi landasan konseptual penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir sebagai dasar dalam menganalisis pemahaman peserta didik Generasi Z terhadap Pendidikan Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi.

A. Teori Pemahaman dalam Pembelajaran

1. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa proses belajar terjadi ketika peserta didik membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran. Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak diterima secara langsung dalam bentuk yang utuh, melainkan dipahami melalui proses berpikir, pengalaman, serta interaksi dengan lingkungan belajar. Konstruktivisme berasal dari kata *to construct* yang berarti membangun, sehingga pembelajaran dipahami sebagai proses aktif dalam membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki peserta didik (Sukiman, 2008).

Pandangan Konstruktivisme menempatkan peserta didik sebagai individu yang aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menerima informasi yang disampaikan guru, tetapi juga menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat materi, tetapi juga bagaimana peserta didik memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap informasi yang diterima (Vygotsky, 1978).

Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan pengetahuan peserta didik berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi (Piaget, 1970). Asimilasi terjadi ketika informasi baru dipahami berdasarkan struktur pengetahuan yang telah dimiliki, sedangkan akomodasi berlangsung ketika

peserta didik menyesuaikan pemahamannya agar sesuai dengan pengalaman baru yang diperoleh (Dahar, 1988). Kedua proses tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik berkembang secara bertahap melalui pengalaman belajar yang dialami.

Selain dipengaruhi oleh pengalaman individu, konstruktivisme juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Vygotsky (1978) menjelaskan bahwa pemahaman peserta didik dapat berkembang melalui interaksi dengan guru maupun teman sebaya. Diskusi, kerja sama, dan pertukaran gagasan selama pembelajaran membantu peserta didik memperluas cara berpikir serta memahami suatu konsep secara lebih mendalam.

Dalam praktik pembelajaran, pendekatan konstruktivisme mendorong peserta didik untuk terlibat aktif melalui kegiatan berdiskusi, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, maupun memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Melalui keterlibatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir secara lebih kritis dan reflektif (Bruner, 1966).

Dalam penelitian ini, teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana peserta didik membangun pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang diperoleh di sekolah, interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, serta pengaruh informasi yang diterima di ruang digital.

2. Pemahaman Kognitif

Pemahaman kognitif merujuk pada kemampuan mental individu dalam menerima, mengolah, serta menginterpretasikan informasi sebagai bagian dari proses belajar. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan ini membantu peserta didik mengenali, memahami, dan menafsirkan informasi sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep maupun peristiwa yang dipelajari. Hal tersebut sejalan dengan konsep ranah kognitif yang

dikemukakan oleh Bloom (1956), bahwa kemampuan berpikir peserta didik berkembang secara bertahap dari kemampuan dasar menuju kemampuan berpikir yang lebih kompleks.

Selain dipengaruhi oleh kemampuan individu, perkembangan kognitif peserta didik dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan Vygotsky (1978), proses belajar tidak berlangsung secara individual, melainkan melibatkan hubungan dengan orang lain, seperti guru maupun teman sebaya. Melalui interaksi tersebut, peserta didik memperoleh arahan, pengalaman, serta dukungan yang memudahkan mereka memahami suatu konsep secara lebih baik.

Lebih lanjut, konsep *Zone of Proximal Development (ZPD)* menjelaskan bahwa peserta didik dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui bantuan dari lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Dahar (1988) menegaskan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam penelitian ini, pemahaman kognitif dipandang sebagai hasil dari keterkaitan antara materi Pendidikan Pancasila dengan pengalaman sosial peserta didik, termasuk pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan digital.

Proses pembelajaran tersebut tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi turut mendukung perkembangan fungsi mental peserta didik ke tingkat yang lebih tinggi. Vygotsky (1978) menjelaskan bahwa pembelajaran yang berlangsung secara terarah dapat memunculkan proses perkembangan mental peserta didik yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Dengan demikian, proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kognitif peserta didik.

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, pemahaman kognitif menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menangkap makna dari materi yang dipelajari. Peserta didik tidak hanya mampu mengingat informasi, tetapi juga dapat menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari serta menghubungkannya dengan situasi yang berbeda. Kemampuan tersebut

menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami informasi yang diterima dan mampu memberikan makna terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman kognitif menjadi bagian penting dalam membantu peserta didik menggunakan pengetahuan sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, pemahaman kognitif dipandang sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami, menafsirkan, dan memaknai nilai-nilai Pancasila yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Pemahaman tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan menjelaskan konsep, tetapi juga dari kemampuan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman serta realitas kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi berbagai pengaruh globalisasi.

3. Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom merupakan salah satu kerangka dalam pendidikan yang digunakan untuk memahami tingkatan kemampuan berpikir peserta didik selama proses pembelajaran. Kerangka ini dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom bersama timnya pada tahun 1956 untuk membantu pendidik dalam menyusun tujuan pembelajaran sekaligus mengevaluasi hasil belajar secara lebih terarah (Bloom, 1956).

Dalam taksonomi Bloom, kemampuan belajar dikelompokkan ke dalam tiga ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengolah pengetahuan. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, serta respons emosional peserta didik terhadap suatu pembelajaran. Sementara itu, ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu (Bloom, 1956). Dari ketiga ranah tersebut, ranah kognitif menjadi salah satu bagian yang banyak digunakan dalam pembelajaran di sekolah karena berkaitan langsung dengan kemampuan memahami materi pelajaran.

Pada ranah kognitif, Bloom mengelompokkan kemampuan berpikir peserta didik ke dalam enam tingkatan yang tersusun secara bertahap dari kemampuan dasar menuju kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Keenam tingkatan tersebut terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Setiap tingkat menunjukkan bentuk kemampuan berpikir yang berbeda dalam memahami maupun menggunakan informasi selama proses belajar.

- a. Tingkatan pertama adalah pengetahuan, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, seperti fakta, istilah, atau konsep tertentu.
- b. Tingkatan kedua adalah pemahaman, yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menangkap makna dari suatu informasi serta menjelaskan kembali informasi tersebut dengan cara yang lebih sederhana.
- c. Tingkatan ketiga adalah penerapan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu.
- d. Tingkatan keempat adalah analisis, menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga hubungan antar bagian dapat dipahami lebih jelas.
- e. Tingkatan kelima adalah sintesis, peserta didik mampu menyusun beragam unsur pengetahuan menjadi suatu gagasan atau bentuk baru yang lebih terstruktur.
- f. Tingkatan terakhir adalah evaluasi, yaitu kemampuan peserta didik untuk memberikan penilaian terhadap suatu gagasan, konsep, atau peristiwa berdasarkan kriteria tertentu. Tingkatan ini berada pada level tertinggi karena melibatkan kemampuan berpikir kompleks serta pertimbangan yang mendalam (Bloom, 1956).

Dalam konteks pembelajaran, taksonomi Bloom membantu pendidik memahami perkembangan kemampuan berpikir peserta didik secara bertahap. Melalui kerangka tersebut, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan mengingat informasi, tetapi juga mendorong peserta didik

untuk memahami, menerapkan, menganalisis, hingga memberikan penilaian terhadap materi yang dipelajari.

4. Indikator Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu tingkatan dalam ranah kognitif yang dijelaskan dalam taksonomi Benjamin S. Bloom. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya mampu menggali atau mengingat informasi yang telah dipelajari, tetapi juga memahami makna dari informasi tersebut serta menjelaskannya kembali dengan cara yang lebih sederhana (Bloom, 1956).

Dalam proses pembelajaran, pemahaman dapat terlihat melalui kemampuan peserta didik dalam menjelaskan suatu konsep, menafsirkan informasi, serta menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan situasi yang berbeda. Dahar (1988) menjelaskan bahwa kemampuan memahami menunjukkan adanya proses pemaknaan terhadap informasi yang diterima, sehingga peserta didik tidak berhenti pada aktivitas menghafal materi pembelajaran semata.

Bloom (1956) mengemukakan bahwa kemampuan pemahaman dapat dikenali melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan menerjemahkan (*translation*), menafsirkan (*interpretation*), dan mengekstrapolasi (*extrapolation*).

- a. Menerjemahkan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengungkap kembali suatu informasi menggunakan bahasa atau bentuk yang berbeda.
- b. Menafsirkan berkaitan dengan kemampuan memahami makna dari suatu konsep atau informasi yang disampaikan.
- c. Mengekstrapolasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memperkirakan atau menarik kesimpulan dari informasi yang telah dipelajari.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, indikator pemahaman dapat terlihat dari kemampuan peserta didik dalam menjelaskan nilai-nilai Pancasila, memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,

serta menghubungkannya dengan berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan Sapriya (2012) yang menekankan bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman peserta didik tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga dapat terlihat melalui cara mereka memaknai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pendidikan Pancasila dan *Civic Knowledge*

1. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib yang memiliki peran strategis pada setiap jenjang satuan pendidikan, tidak hanya dalam pembentukan karakter peserta didik, tetapi juga dalam membangun jiwa kebangsaan dan membentuk karakter manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Badan Standar, Kurikulum, 2025, hlm. 2).

Secara yuridis, Pendidikan Pancasila berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Dalam kajian akademik, Pendidikan Pancasila tidak hanya dipahami sebagai penyampaian materi mengenai lima sila, tetapi juga sebagai proses pendidikan nilai yang menekankan pada penghayatan dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip dasar Pancasila. Hal ini mencakup dimensi filosofis sebagai dasar negara serta dimensi sosiologis yang berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Kaelan, 2013). Dengan demikian, Pendidikan Pancasila memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku yang saling berkaitan.

Pada praktik pembelajaran, Pendidikan Pancasila diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ke dalam kehidupan peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan secara terpisah, melainkan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membentuk cara berpikir dan bertindak (Kaelan, 2013). Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi dan digitalisasi, Pendidikan Pancasila juga menghadapi tantangan dalam menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan di tengah arus informasi yang semakin terbuka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan adaptif agar nilai-nilai Pancasila tetap dapat dipahami dan diinternalisasi oleh peserta didik sesuai dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari (Kemendikbudristek, 2024).

2. Konsep Civic Education

Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami nilai-nilai demokrasi, hukum, serta prinsip kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011), Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi tentang negara dan pemerintahan, tetapi juga berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membangun kesadaran peserta didik sebagai bagian dari masyarakat dan negara.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, *Civic Education* dipahami sebagai upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat kebangsaan, serta kesadaran berkontribusi kepada peserta didik. Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai konsep dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara (Kemendikbudristek, 2025).

Selain itu, *Civic Education* juga memiliki peran dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk membangun kesadaran peserta didik agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sapriya, 2012).

3. Pengertian *Civic Knowledge*

Civic Knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Civic Knowledge* berkaitan dengan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh warga negara mengenai berbagai konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi individu untuk memahami peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat (Sapriya, 2012).

Menurut Wahab dan Sapriya (2011), *civic knowledge* merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai konsep dasar kehidupan bernegara, seperti pemahaman tentang konstitusi, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan tersebut diperlukan agar warga negara dapat memahami kehidupan kenegaraan serta mampu berperan secara bertanggung jawab dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Branson (1999) menjelaskan bahwa *civic knowledge* mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, sistem politik, hukum, serta lembaga-lembaga negara. Pemahaman tersebut penting agar warga negara mengetahui bagaimana sistem kenegaraan berjalan serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Civic knowledge menjadi salah satu dasar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep-konsep kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih kontekstual. Pemahaman ini berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (Branson, 1999).

Dalam penelitian ini, konsep *civic knowledge* digunakan sebagai landasan untuk memahami aspek pengetahuan kewarganegaraan yang dimiliki peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai bagian dari pengetahuan kewarganegaraan yang berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan ketahanan diri peserta didik.

4. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan memiliki beberapa dimensi yang berkaitan dengan pemahaman warga negara terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi tersebut menjadi bagian penting dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena membantu peserta didik memahami konsep dasar yang berkaitan dengan sistem politik, hukum, serta nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat (Sapriya, 2012).

Menurut Branson (1999), pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, lembaga-lembaga negara, konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara. Pengetahuan tersebut diperlukan agar warga negara dapat memahami bagaimana suatu

negara dijalankan serta bagaimana mereka dapat berperan dalam kehidupan demokratis.

Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dimensi pengetahuan kewarganegaraan umumnya mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut (Branson, 1999):

- a. Pengetahuan mengenai prinsip dan nilai dasar kehidupan bernegara, seperti nilai demokrasi, keadilan, kebebasan, serta persamaan di hadapan hukum.
- b. Pengetahuan mengenai konstitusi dan sistem pemerintahan, yang meliputi pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar, struktur pemerintahan, serta fungsi lembaga-lembaga negara.
- c. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu pemahaman tentang berbagai hak yang dimiliki oleh warga negara serta tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Pengetahuan mengenai peran warga negara dalam kehidupan demokratis, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan kehidupan masyarakat.

Melalui pemahaman terhadap berbagai dimensi tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep kewarganegaraan secara lebih utuh. Pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis, tetapi juga menjadi dasar bagi peserta didik dalam mengembangkan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Branson, 1999).

C. Persepsi Peserta Didik Terhadap Pembelajaran

1. Teori Persepsi Sosial

Persepsi merupakan fondasi awal bagi proses pembelajaran. Menurut Rakhmat (2011), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, yang dalam konteks pendidikan melibatkan kognisi tingkat tinggi

dalam penginterpretasian informasi sensorik. Persepsi menjadi dasar bagi peserta didik dalam memahami dan merespons berbagai informasi yang diterima selama proses pembelajaran.

Menurut Baron dan Byrne dalam Saleh (2020), persepsi sosial merupakan proses ketika individu berusaha memahami dan menafsirkan perilaku, karakteristik, serta motif orang lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sosial. Proses tersebut melibatkan aktivitas kognitif yang memungkinkan seseorang membentuk kesan atau penilaian terhadap individu maupun kelompok.

Persepsi sosial tidak terbentuk secara langsung, melainkan melalui proses pengolahan informasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman individu, pengetahuan yang dimiliki, serta lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara seseorang memahami suatu peristiwa maupun perilaku orang lain (Baron dan Byrne, 2005).

Dalam konteks pendidikan, persepsi sosial dapat memengaruhi cara peserta didik memandang berbagai nilai dan konsep yang dipelajari di sekolah. Persepsi yang dimiliki peserta didik akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka memahami serta memaknai nilai-nilai yang diajarkan dalam proses pembelajaran (Rakhmat, 2011).

Berkaitan dengan penelitian ini, teori persepsi sosial digunakan untuk memahami bagaimana peserta didik memandang dan menafsirkan nilai-nilai Pendidikan Pancasila di tengah arus globalisasi. Menurut Saleh (2020), persepsi sosial merupakan proses yang digunakan individu untuk mencoba memahami orang lain dan lingkungan sosialnya. Persepsi tersebut terbentuk melalui pengalaman belajar, interaksi sosial, serta informasi yang diperoleh peserta didik dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana peserta didik memaknai identitas nasional mereka, khususnya dalam menghadapi pengaruh globalisasi.

2. Proses Pembentukan Persepsi

Persepsi sosial tidak muncul secara langsung, tetapi terbentuk melalui suatu proses ketika individu menerima, mengolah, dan menafsirkan informasi yang berasal dari lingkungan sosial. Melalui mekanisme tersebut, seseorang dapat membentuk pemahaman atau penilaian terhadap orang lain maupun berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya (Baron dan Byrne, 2005).

Menurut Baron dan Byrne (2005), persepsi sosial merupakan proses ketika individu berusaha memahami perilaku serta karakteristik orang lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sosial. Proses ini melibatkan aktivitas kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan informasi sosial sehingga terbentuk suatu kesan atau penilaian terhadap orang lain.

Selain itu, Walgito (2010) menjelaskan bahwa proses pembentukan persepsi pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan.

- a. Tahap pertama adalah proses penerimaan stimulus, yaitu ketika individu menerima rangsangan dari lingkungan melalui alat indera.
- b. Tahap kedua adalah proses pengorganisasian atau pengolahan informasi, yaitu ketika informasi yang diterima mulai diolah dan dihubungkan dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki individu.
- c. Tahap ketiga adalah proses interpretasi, yaitu ketika individu memberikan makna atau penilaian terhadap stimulus yang diterima.

Melalui tahapan tersebut, individu dapat membentuk pemahaman terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan, proses pembentukan persepsi sosial juga terjadi pada peserta didik ketika mereka menerima berbagai informasi, nilai, dan pengalaman belajar di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Walgito, 2010).

Berkaitan dengan penelitian ini, proses pembentukan persepsi sosial membantu menjelaskan bagaimana peserta didik membangun cara pandang terhadap nilai-nilai Pendidikan Pancasila di tengah arus globalisasi. Menurut Saleh (2020), persepsi tersebut terbentuk melalui proses kognitif yang

dipengaruhi oleh pengalaman belajar, interaksi sosial, serta informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, cara peserta didik memaknai Pancasila merupakan hasil dari akumulasi interaksi mereka dengan lingkungannya.

3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Persepsi yang dimiliki oleh setiap individu tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena proses persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan individu maupun objek yang dipersepsikan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara seseorang memahami serta menafsirkan suatu peristiwa atau fenomena sosial (Walgito, 2010).

Menurut Walgito (2010), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Objek yang Dipersepsi

Objek yang dipersepsikan merupakan segala sesuatu yang menjadi sumber rangsangan bagi individu. Objek tersebut dapat berupa orang, peristiwa, maupun situasi tertentu. Karakteristik dari objek yang diamati dapat memengaruhi bagaimana individu memberikan makna atau penilaian terhadap objek tersebut.

b. Faktor Alat Indera dan Sistem Saraf

Persepsi terjadi melalui proses penerimaan rangsangan oleh alat indera yang kemudian diteruskan melalui sistem saraf menuju otak. Proses ini memungkinkan individu untuk menerima dan mengolah informasi yang berasal dari lingkungan. Kondisi alat indera serta sistem saraf dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menerima stimulus dari lingkungan.

c. Faktor Perhatian Individu

Perhatian merupakan pemutusan aktivitas mental terhadap suatu objek tertentu. Tingkat perhatian individu terhadap suatu objek dapat memengaruhi proses terbentuknya persepsi. Semakin besar perhatian yang diberikan terhadap suatu objek, semakin besar pula kemungkinan individu untuk memahami dan menafsirkan objek tersebut secara lebih jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang diamati, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi individu yang melakukan proses persepsi (Walgito, 2010). Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi bagaimana peserta didik memandang dan menafsirkan nilai-nilai Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

D. Generasi Z dalam Era Globalisasi

1. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z memiliki karakteristik khas sebagai generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat dan terbuka. Kehadiran teknologi digital sejak dini membentuk cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi generasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seemiller dan Grace (2017) menjelaskan bahwa Generasi Z cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, terutama perubahan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Kemampuan tersebut tercermin dalam kemudahan mereka menyesuaikan diri dengan inovasi serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi.

Dalam konteks pendidikan, karakteristik Generasi Z tampak pada kecenderungan mereka terhadap proses pembelajaran yang bersifat interaktif, visual, dan kontekstual. Generasi ini cenderung kurang tertarik pada pembelajaran yang bersifat abstrak dan teoritis semata, serta lebih responsif terhadap metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif dan penggunaan media digital (Seemiller dan Grace, 2017). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran gaya belajar yang menuntut penyesuaian pendekatan pedagogis.

Karakteristik lain yang menonjol dari Generasi Z adalah kemampuan melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan atau yang dikenal dengan istilah (*multitasking*). Kebiasaan mengakses berbagai *platform* digital dalam waktu yang bersamaan membentuk pola perhatian yang terfragmentasi, namun sekaligus menunjukkan kemampuan mengelola berbagai sumber

informasi secara cepat (Twenge, 2017). Kondisi ini memengaruhi cara Generasi Z belajar, dimana mereka lebih menyukai penyajian materi yang ringkas, visual, dan interaktif.

Selain itu, Generasi Z juga dikenal memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap keberagaman. Interaksi yang intens melalui media digital memperluas ruang pergaulan mereka hingga melampaui batas geografis dan kultural. Paparan terhadap berbagai pandangan, nilai, dan latar belakang sosial berpotensi membentuk sikap toleran dan inklusif. Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak selalu diiringi dengan kemampuan berpikir kritis dalam memilah nilai. Tanpa landasan nilai yang kuat, kondisi ini dapat mengarah pada relativisme nilai (Twenge, 2017).

Karakteristik Generasi Z juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Intensitas penggunaan media digital yang tinggi berpotensi memengaruhi daya konsentrasi jangka panjang serta mendorong kecenderungan menerima informasi secara instan tanpa proses refleksi yang mendalam (Carr, 2010). Arus informasi yang tidak terbatas memungkinkan masuknya berbagai nilai yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan pendidikan yang kuat dan kontekstual, pemahaman Generasi Z terhadap nilai-nilai dasar bangsa dapat mengalami pergeseran. Intensitas paparan informasi digital yang tinggi dapat memengaruhi cara individu dalam memproses nilai dan membentuk pandangan terhadap realitas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Twenge (2017) yang menyatakan bahwa perubahan pola interaksi dan penggunaan teknologi pada Generasi Z turut memengaruhi cara berpikir, sikap, serta orientasi nilai mereka. Oleh karena itu, kajian mengenai karakteristik Generasi Z menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan pendekatan pendidikan yang mampu memperkuat karakter dan ketahanan diri peserta didik di tengah dinamika globalisasi.

2. Globalisasi dan Pengaruh Budaya

Globalisasi merupakan fenomena yang ditandai dengan semakin terbukanya hubungan antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses globalisasi sehingga arus pertukaran informasi, nilai, serta budaya antar masyarakat dunia berlangsung semakin intensif. Kondisi tersebut menjadikan batas-batas geografis antarnegara menjadi semakin kabur dan memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Giddens, 1990).

Menurut Giddens (1990), globalisasi merupakan proses intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan berbagai peristiwa lokal dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain. Melalui tahapan tersebut, berbagai perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat memengaruhi wilayah lain secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam konteks kebudayaan, globalisasi mendorong terjadinya pertukaran nilai, gaya hidup, serta pola interaksi sosial antar masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Proses ini memungkinkan masyarakat mengenal dan mengadopsi unsur budaya baru. Fenomena tersebut dikenal sebagai difusi budaya, yaitu proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya (Koentjaraningrat, 2009).

Di satu sisi, globalisasi memberikan berbagai peluang bagi masyarakat untuk memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman budaya. Akses informasi yang semakin terbuka memungkinkan individu mengenal berbagai nilai, tradisi, dan persepsi yang berbeda, sehingga mendorong berkembangnya sikap terbuka dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial (Giddens, 1990).

Namun di sisi lain, globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan budaya. Fenomena ini

menciptakan ruang tanpa batas yang memungkinkan pertukaran informasi secara masif, namun juga membawa tantangan terhadap jati diri bangsa (Sumarni dkk., 2024). Tanpa adanya kemampuan untuk menyaring dan memahami nilai secara kritis, individu dapat dengan mudah mengadopsi berbagai nilai baru yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal (Giddens, 1990).

Dalam konteks Generasi Z, pengaruh globalisasi semakin terasa karena intensitas interaksi mereka dengan teknologi digital dan media sosial. Melalui berbagai *platform* digital, generasi ini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan budaya dari berbagai belahan dunia. Kondisi ini membentuk cara pandang yang lebih terbuka, tetapi sekaligus menuntut kemampuan untuk memahami dan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa (Twenge, 2017).

Berkaitan dengan penelitian ini, globalisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara peserta didik memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Pancasila. Arus informasi serta pengaruh budaya global dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan (Sumarni dkk., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi penting sebagai landasan dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan yang terjadi di era globalisasi (Kemendikbudristek, 2024).

E. Ketahanan Diri dan Pendidikan Pancasila

1. Konsep Ketahanan Diri (*Resilience*)

Ketahanan diri atau *resilience* merupakan kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, serta bangkit kembali ketika menghadapi berbagai tantangan, tekanan, maupun perubahan dalam kehidupan. Konsep ini banyak digunakan dalam kajian psikologi dan pendidikan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mampu mempertahankan kondisi psikologis yang positif meskipun berada dalam situasi yang sulit (Masten dkk., 2023).

Menurut Masten dkk. (2023), ketahanan diri berkaitan dengan kemampuan individu untuk menunjukkan proses adaptasi yang positif ketika berada dalam situasi yang penuh tantangan atau risiko. Individu yang memiliki ketahanan diri tidak hanya mampu bertahan dari tekanan yang dihadapi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan di sekitarnya.

Pandangan lain dikemukakan oleh Grotberg (1995), Grotberg menjelaskan bahwa ketahanan diri merupakan kemampuan individu untuk menghadapi kesulitan, mengatasinya, serta belajar dari pengalaman tersebut. Dalam pandangannya, ketahanan diri tidak hanya berasal dari kekuatan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan yang diterima individu dari lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, Grotberg (1995) juga mengemukakan bahwa ketahanan diri dapat dipahami melalui tiga sumber utama, yaitu *I Have*, *I Am*, dan *I Can*:

- a. Konsep *I Have* berkaitan dengan dukungan yang diperoleh individu dari lingkungan, seperti keluarga, sekolah, maupun orang-orang di sekitarnya.
- b. Konsep *I Am* berkaitan dengan kekuatan yang ada dalam diri individu, seperti rasa percaya diri, tanggung jawab, serta sikap positif terhadap diri sendiri.
- c. Konsep *I Can* berkaitan dengan kemampuan individu dalam menghadapi masalah, berkomunikasi dengan orang lain, serta mencari solusi ketika menghadapi kesulitan.

Dalam konteks pendidikan, ketahanan diri dipahami bukan hanya sebagai kemampuan psikologis, tetapi juga kemampuan peserta didik mempertahankan nilai dan identitas kebangsaan. Peserta didik yang memiliki ketahanan diri cenderung lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, mengelola tekanan, serta tetap mempertahankan sikap positif ketika menghadapi berbagai situasi (Masten dkk., 2023).

Berkaitan dengan penelitian ini, konsep ketahanan diri menjadi penting untuk memahami bagaimana peserta didik mampu mempertahankan nilai-nilai yang diperoleh melalui Pendidikan Pancasila di tengah pengaruh

globalisasi. Ketahanan diri yang baik memungkinkan individu untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diyakini, meskipun dihadapkan pada tekanan budaya luar (Sumarni dkk., 2024).

Secara konseptual, ketahanan diri dipahami sebagai kemampuan individu untuk menghadapi tantangan, menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta tetap berkembang secara positif dalam menghadapi dinamika kehidupan di era globalisasi (Grotberg, 1995). Dalam penelitian ini, konsep ketahanan diri tidak hanya dipahami sebagai kemampuan psikologis untuk beradaptasi terhadap tekanan, tetapi juga sebagai kemampuan peserta didik mempertahankan nilai-nilai Pancasila ketika menghadapi pengaruh globalisasi.

2. Pancasila sebagai Ketahanan Ideologis

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Menurut Rustan (2016), Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari kebudayaan dan pengalaman historis bangsa Indonesia sehingga memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga identitas serta kepribadian bangsa.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, Pancasila juga berperan sebagai landasan dalam membangun ketahanan ideologis bangsa. Ketahanan ideologis dapat dipahami sebagai kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan

nasional dari berbagai pengaruh yang dapat melemahkan jati diri bangsa (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2012).

Rustan (2016) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan warga negara. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme, rasa tanggung jawab, serta kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Generasi Z, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting, terutama di tengah perkembangan globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya dan nilai dari luar. Arus informasi yang semakin terbuka dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan (Giddens, 1990). Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai landasan dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan sosial.

Pemahaman peserta didik terhadap Pendidikan Pancasila menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat ketahanan ideologis Generasi Z. Melalui pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, serta mampu menyaring berbagai pengaruh yang datang dari luar (Sapriya, 2012).

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan ideologis yang berperan dalam memperkuat ketahanan bangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan serta mampu menghadapi tantangan di era globalisasi (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2012).

3. Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Ketahanan Diri

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta kesadaran kebangsaan peserta didik. Melalui proses pembelajaran, Pendidikan Pancasila tidak hanya memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga

mendorong peserta didik untuk menghayati serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sapriya, 2012).

Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya (2011) yang menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, termasuk Pendidikan Pancasila, memiliki fungsi untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran tidak hanya ditekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan berbangsa.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan dalam membentuk ketahanan diri. Nilai-nilai tersebut membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, kemampuan mengambil keputusan, serta kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Lickona, 1991). Proses internalisasi nilai tersebut berlangsung melalui pengalaman belajar, diskusi, maupun interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Selain itu, Pendidikan Pancasila juga berperan dalam membantu peserta didik membangun kemampuan reflektif terhadap berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut memungkinkan peserta didik untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang diyakini sebelum mengambil suatu sikap atau tindakan. Peran Pendidikan Pancasila dalam konteks pembentukan ketahanan diri tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar bangsa, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukan karakter serta kemampuan individu dalam menyikapi berbagai situasi secara bijaksana (Lickona, 1991).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan baru dan sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian terdahulu

membantu peneliti dalam menjadikan penelitian ini lebih orisinal dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Haliza dan Dewi (2021) **PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam menanamkan nilai kebangsaan dan moral sosial. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan peserta didik di tengah perubahan sosial yang cepat. Namun, dalam praktik pembelajaran, Pendidikan Pancasila cenderung disampaikan secara normatif dan berorientasi pada materi, sehingga pemahaman peserta didik belum sepenuhnya berkembang menjadi kesadaran nilai yang reflektif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran Pendidikan Pancasila masih belum optimal dalam membangun daya tahan peserta didik terhadap pengaruh eksternal, termasuk arus globalisasi.
2. Sumarni, Dewi, dan Adriyansyah (2024) **PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN NASIONALISME PESERTA DIDIK**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki hubungan positif dengan sikap nasionalisme peserta didik. Peserta didik yang memahami nilai-nilai Pancasila cenderung menunjukkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman tersebut masih dominan pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya tercermin dalam sikap keseharian peserta didik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman materi Pancasila dengan internalisasi nilai sebagai bekal menghadapi tantangan globalisasi.
3. Putrayosta dan Najicha (2023) **PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi, khususnya melalui media digital, berkontribusi terhadap pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Peserta didik semakin akrab

dengan budaya global yang membentuk gaya hidup, cara berpikir, dan pola interaksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa penguatan pendidikan nilai, kondisi tersebut berpotensi melemahkan identitas kebangsaan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian konseptual dan belum menggali pengalaman langsung peserta didik dalam memaknai Pendidikan Pancasila sebagai benteng nilai.

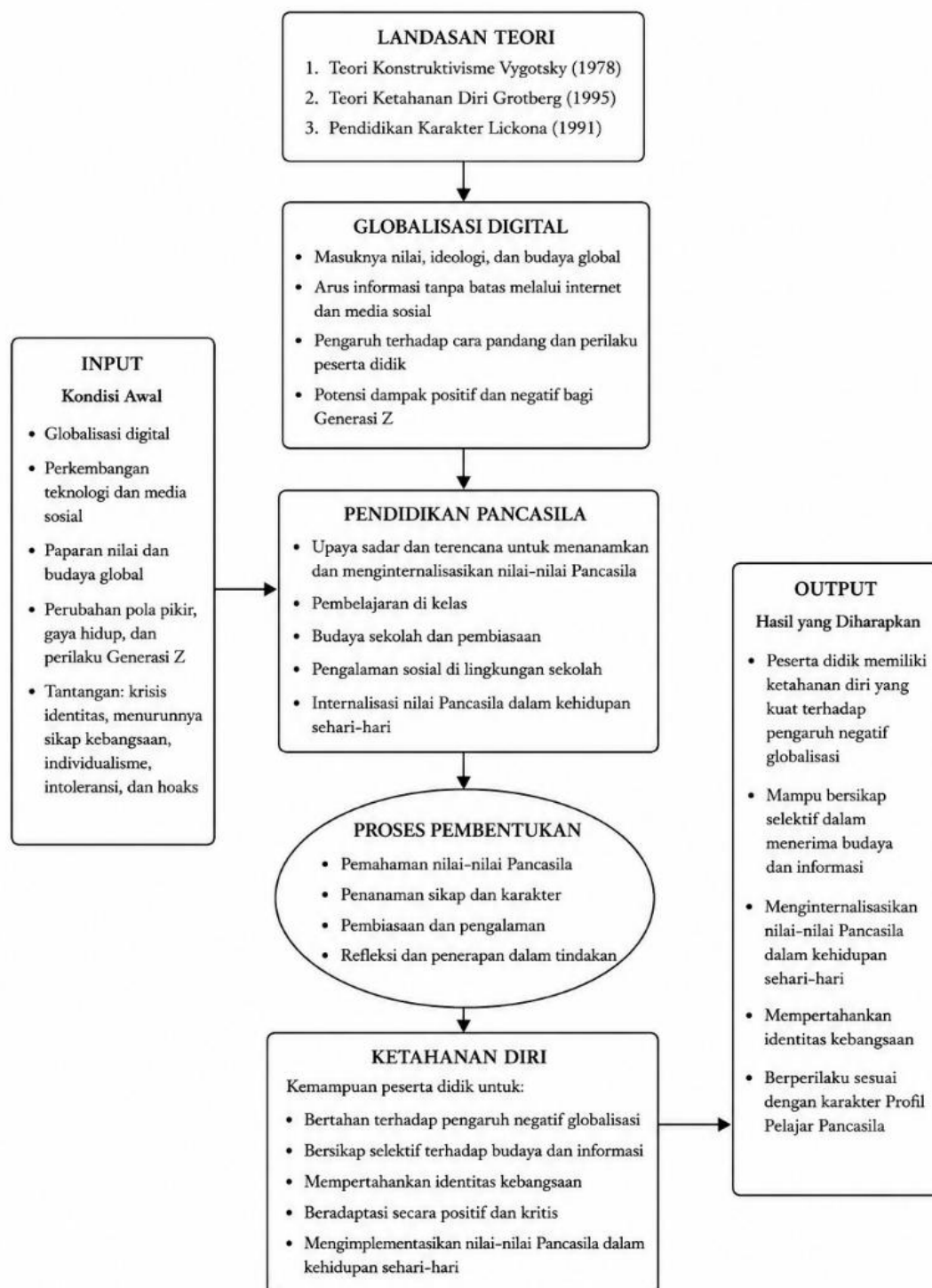
4. Dewi dan Najicha (2024) **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI STRATEGI MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL ERA GLOBALISASI**. Penelitian ini menunjukkan bahwa arus globalisasi memberikan tantangan serius terhadap identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terbuka terhadap budaya global. Penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai nasionalisme, moral, dan kesadaran berbangsa agar masyarakat mampu menyikapi dampak globalisasi secara bijak. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan nilai sebagai benteng identitas bangsa. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum mengkaji secara empiris bagaimana pemahaman peserta didik berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan diri dalam menghadapi globalisasi.
5. Aulia dan Anggraeni (2022) **KETAHANAN DIRI PESERTA DIDIK DALAM MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI BUDAYA**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi budaya membawa dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku peserta didik, terutama dalam kecenderungan meniru budaya populer global. Penelitian ini menemukan bahwa peserta didik yang tidak memiliki landasan nilai yang kuat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh nilai-nilai luar yang tidak sejalan dengan karakter bangsa. Ketahanan diri dipandang sebagai kemampuan penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan nilai. Namun demikian, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji bagaimana Pendidikan Pancasila dipahami oleh peserta didik sebagai sarana pembentukan ketahanan diri tersebut.

6. Arum, Zahrani, dan Duha (2023) **GENERASI Z DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital dengan intensitas penggunaan teknologi yang tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa kemudahan akses informasi membawa dampak positif berupa keterbukaan wawasan, namun juga meningkatkan risiko masuknya nilai-nilai global tanpa proses penyaringan yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan kemampuan reflektif dan nilai dasar yang kuat agar mampu menyikapi arus informasi secara kritis. Akan tetapi, penelitian ini belum secara khusus mengaitkan kondisi tersebut dengan peran Pendidikan Pancasila dalam membangun ketahanan diri peserta didik.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran sistematis yang menunjukkan alur pemikiran penelitian secara logis. Kerangka ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dan merepresentasikan keterkaitan antar konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari kondisi globalisasi digital yang memengaruhi kehidupan peserta didik Generasi Z melalui paparan nilai dan budaya global. Paparan tersebut memengaruhi pola pikir dan cara pandang peserta didik terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk terhadap Pendidikan Pancasila.

Kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap Pendidikan Pancasila dipandang sebagai proses kognitif yang memengaruhi cara peserta didik memaknai nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman tersebut selanjutnya membentuk persepsi peserta didik terhadap relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi yang positif diharapkan berkontribusi terhadap terbentuknya ketahanan diri dalam menghadapi pengaruh globalisasi.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Peneliti (2026)